



PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA



PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA

Jl. Ir. H. DJUANDA SIDOARJO

PROGRAM KERJA

TAHUN 2024

Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo

Telp : 031-866369

Email ; surabaya@dilmil-surabaya.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga penyusunan Program Kerja Tahun 2024 Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam rangka menegakkan keadilan di Negara Indonesia, Pengadilan Militer III-12 Surabaya dituntut untuk menyelenggarakan tugasnya dengan baik dan bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung RI. Pengadilan Militer III-12 Surabaya diharapkan mampun turut serta dalam menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adi, tepat dan benar.

Program kerja tahun 2024 sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pada tahun 2024 yang meliputi tugas bidan yustisial, kepaniteraan, kesekretariatan dan program-program unggulan serta tugas lainnya.

Program kerja tahun 2024 disusun secara sistematis dan terarah serta berdasarkan Porgram Prioritas Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara serta Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020-2024.

Harapan pimpinan kepada seluruh pengawai Pengadilan Militer III-12 Suabaya dapat melaksanakan program kerja ini dengan baik dan sesuai target.

Sidoarjo, Februari 2024
Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Sugeng Aryanto, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 11980058680275



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Profil Organisasi	2
C. Visi Dan Misi	6
D. Tujuan Dan Sasaran	7
BAB II. PROGRAM KERJA	9
A. Program Utama Dan Kegiatan Pokok	9
B. Penjabaran Program Kerja	10
C. Dukungan Anggaran	12
BAB III. PENUTUP	18



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Pegawai Tahun 2024	2
---	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan dinamika hukum dan masyarakat yang semakin dinamis dan kompleks di era keterbukaan informasi sekarang ini, tantangan yang dihadapi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah untuk lebih berperan aktif dan menunjukkan peran dirinya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi pada sektor pelayanan, serta dituntut dalam perubahan-perubahan yang cerdas dan inovatif untuk memberikan pelayanan kepada pengguna layanan/masyarakat guna mewujudkan performa kinerja pengadilan yang unggul/prima.

Program Kerja adalah bagian yang penting dalam sebuah fungsi manajemen, karena melalui program kerja itulah dapat dilihat arah dan sasaran kerja dari suatu unit organisasi. Program kerja merupakan pedoman atau panduan setiap unit organisasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya, agar visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat tercapai.

Seluruh rencana kegiatan yang disusun dalam program kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan suatu perencanaan yang strategik yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat memberi pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Pelayanan prima tersebut adalah pelayanan peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan biaya ringan.



B. PROFIL ORGANISASI

Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan salah satu pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo. Wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya meliputi sebagian wilayah di provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari 3 jenis status kepegawaian yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri).

Tahun 2024 Sumber daya manusia Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari 3 jenis status kepegawaian yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap). Tahun 2023 berjumlah 45 orang dengan rincian 24 orang Militer, 12 orang PNS dan 9 orang PPNPN dan 1 orang pegawai BP (diperbantukan) dari Pengadilan Militer III-16 Makasar.

Tabel I.1 Data Pegawai Tahun 2024

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Jenis Kelamin		Jenjang Pendidikan				Usia			
			Laki-laki	Perempuan	S-2	S-1	D-3	SMA	20 – 30 Th	31 – 40 Th	41 – 50 Th	51 – 58 Th
1	Militer	24	23	1	7	8	-	9	1	5	14	4
2	PNS	12	3	9	1	5	3	3	3	3	3	3
3	PTT	9	7	2	-	1	-	8	3	5	-	1
Jumlah		45	33	12	8	14	3	20	7	13	17	8

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A) TUGAS POKOK

Mengacu pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, serta Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disebutkan bahwa Pengadilan Militer III-



12 Surabaya adalah Pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan yaitu :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Dimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Terdakwanya termasuk dalam Kesatuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



B) FUNGSI

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki fungsi utama sebagai badan penegak hukum di tingkat pertama yang memutus suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Agar fungsi utama tersebut dapat berjalan dengan baik, Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga memiliki fungsi lain sebagai pendukung yaitu :

- 1) Fungsi Mengadili (Judicial Power).
 - a. Memeriksa dan memutus dalam Peradilan Tingkat Pertama atas perkara-perkara tindak pidana dan pelanggaran yang terdakwanya adalah prajurit TNI berpangkat Prada sampai Kapten (berdasarkan Perundang-undangan menjadi wewenangnya)
 - b. Mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi, Grasi dan Peninjauan Kembali dalam perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.
- 2) Fungsi Administrasi
yaitu menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok peradilan.
Dalam melaksanakan fungsi administrasi, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan baik dari Mahkamah Agung maupun dari instansi pemerintah lain yang terkait, misalnya Kementerian Keuangan atau BKN.
- 3) Fungsi Pembinaan
yaitu untuk mendukung dalam hal peningkatan kinerja dan sumber daya manusia.



Dalam melaksanakan fungsinya dalam hal pembinaan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Kepala Pengadilan Militer selaku pimpinan melaksanakan pembinaan di internal Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui rapat koordinasi atau jam komandan secara rutin minimal sebulan sekali untuk menyampaikan arahan, informasi atau melakukan evaluasi secara umum.

Adapun pembinaan di luar Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilakukan saat majelis hakim melakukan sidang keliling atau saat tim dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan pengawasan dan pengamatan di Pemasyarakatan Militer. Pembinaan ini umumnya berupa penyuluhan hukum.

4) Fungsi Pengawasan

yaitu merupakan pendukung terlaksananya sistem penyelenggaraan organisasi yang transparan dan akuntabel.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Kepala Pengadilan Militer membentuk Hakim Pengawas Bidang yang bertugas melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini dilakukan secara rutin sekali dalam tiga bulan, dan selanjutnya catatan hasil evaluasi ini dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer untuk ditindaklanjuti.

5) Fungsi Nasihat

Yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

6) Fungsi Lainnya

Memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung



RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Dalam hal penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pengadilan Militer III-12 Surabaya membarenginya dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya bertujuan untuk mewujudkan :

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas aparatur pengadilan.
4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

C. VISI DAN MISI

Visi merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Visi Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :



"MEWUJUDKAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA YANG AGUNG"

Misi adalah sesuatu yang diemban dan akan dilaksanakan, sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

D. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan 4 tujuan yaitu :

- A) Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- B) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
- C) Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel.
- D) Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.



2. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yaitu sesuatu spesifik dan terukur yang akan dicapai atau dihasilkan. Sasaran strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

- A) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- B) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- C) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.



BAB II PROGRAM KERJA

A. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan berdasarkan Renstra yang telah disusun, perlu diperjelas dengan penetapan program utama dan kegiatan pokok yang lebih terperinci.

Program utama merupakan kebijakan dan penjabaran langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran setiap tahunnya. Kegiatan pokok merupakan kegiatan terperinci dengan dukungan anggaran yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Tahun 2024 terdapat 2 program utama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu program penegakan dan pelayanan hukum serta program dukungan manajemen.

1. Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer yang dilakukan oleh prajurit TNI.

Program ini memiliki sasaran yaitu :

- a) Meningkatnya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
- b) Meningkatnya pengelolaan administrasi perkara.



Program ini memiliki 1 kegiatan yaitu peningkatan manajemen peradilan militer.

2. Program Dukungan Manajemen

Program ini merupakan pendukung kelancaran kegiatan administrasi umum serta pelaksanaan kegiatan teknis lain.

Program ini memiliki sasaran yaitu :

- a) Meningkatnya pengelolaan SDM.
- b) Meningkatnya kinerja peradilan
- c) Meningkatnya pelayanan publik.
- d) Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana.

Program ini memiliki 1 kegiatan yaitu pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi.

B. PENJABARAN PROGRAM KERJA

1. Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

Penjabaran program kerja penegakan dan pelayanan hukum dijabarkan berdasar sasaran yaitu sebagai berikut :

A) Terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Untuk mencapai sasaran terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel, direncanakan kegiatan berupa :

- 1) Sidang di luar gedung pengadilan
- 2) Pemeriksaan barang bukti di luar ruang sidang
- 3) Pembelian alat tulis kantor (ATK)
- 4) Penggandaan dan penjilidan berkas perkara
- 5) Pembelian konsumsi sidang



B) Meningkatnya pengelolaan administrasi perkara

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pengelolaan administrasi perkara, direncanakan kegiatan berupa :

- 1) Pengiriman surat-surat yang berhubungan dengan administrasi perkara
- 2) Pengiriman berkas perkara upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu
- 3) Minutasi perkara

2. Program Dukungan Manajemen

A) Meningkatnya Pengelolaan SDM

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pengelolaan SDM, direncanakan kegiatan berupa :

- 1) Pembayaran gaji dan tunjangan
- 2) Pembayaran honor
- 3) pembayaran uang makan
- 4) Pengusulan diklat/bimtek
- 5) Pengusulan kenaikan pangkat/jabatan
- 6) Perjalanan dinas konsultasi/sosialisasi
- 7) Pembelian pakaian dinas
- 8) Sewa rumah dinas Hakim

B) Meningkatnya Kinerja Peradilan

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pelayanan publik, direncanakan kegiatan berupa :

- 1) Pelaksanaan operasional sehari-hari perkantoran
- 2) Langganan daya dan jasa
- 3) Pemeliharaan gedung kantor
- 4) Pembelian ATK
- 5) Langganan hosting website
- 6) Pengiriman surat dinas



C) Meningkatnya pelayanan publik

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pelayanan publik, direncanakan kegiatan berupa :

- 1) Pembelian lisensi video conference

C. DUKUNGAN ANGGARAN

Anggaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2024, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memperoleh 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu :

- DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) atau disebut pula dengan DIPA 01, Nomor SP DIPA-005.01.2.663314/2024 tanggal 24 November 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.150.453.000,- (enam milyar seratus lima puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI atau disebut pula dengan DIPA 05, Nomor SP DIPA-005.05.2.663315/2024 tanggal 24 November 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 181.780.000,- (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

1. DIPA DARI BUA MA-RI (DIPA 01)

Anggaran dari Badan Urusan Administrasi (BUA) MA-RI dalam DIPA 01 digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional dan non operasional perkantoran. DIPA 01 terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang.

Rencana pelaksanaan belanja untuk anggaran DIPA 01 sebagai berikut :



1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai tahun 2024 dianggarkan untuk beberapa belanja yaitu :

- Belanja gaji PNS
- Belanja tunjangan PNS dan TNI
- Belanja uang makan PNS

2. Belanja Barang.

Belanja barang tahun 2024 dianggarkan untuk beberapa belanja yaitu :

- Belanja kebutuhan sehari-hari perkantoran
- Belanja langganan daya dan jasa
- Belanja pemeliharaan gedung dan halaman
- Belanja operasional Hakim
- Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin
- Belanja operasional kantor
- Belanja perjalanan dinas konsultasi

2. DIPA DARI DITJEN BADILMILTUN MA-RI (DIPA 05)

Anggaran dari Ditjen Badilmiltun MA-RI dalam DIPA 05 digunakan untuk mendukung penyelesaian perkara. DIPA 05 hanya terdiri atas belanja barang.

Rencana pelaksanaan belanja untuk anggaran DIPA 05 yaitu :

- Pendaftaran Berkas Perkara Kejahatan.
- Pendaftaran Berkas Perkara Pelanggaran.
- Belanja perjalanan dinas sidang di luar gedung
- Belanja jasa pengiriman surat/berkas perkara
- Belanja kebutuhan pemeriksaan di sidang pengadilan
- Belanja kebutuhan administrasi penyelesaian perkara
- Minutasi/ Upaya Hukum.



Adapun rencana aksi program kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2024 berdasarkan program dan kegiatan serta anggaran adalah sebagaimana ditunjukkan oleh tabel di bawah :



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

SASARAN STRATEGIS 1

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	95%	95%	95%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	75%	75%	75%
		c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	79%	79%	79%	79%
		d. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98	98	98	98

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1	Menyusun rencana sidang	✓	✓	✓	✓	Jadwal rencana sidang	Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	78.480.000
2	Menetapkan susunan majelis hakim	✓	✓	✓	✓	- Penetapan Hakim			
3	Menetapkan panitera	✓	✓	✓	✓	- Penetapan Panitera			
4	Melaksanakan persidangan secara tepat waktu, transparan, efektif dan efisien	✓	✓	✓	✓	- Putusan - Berita Acara Sidang			
5	Menyusun laporan penyelesaian perkara	✓	✓	✓	✓	- Laporan perkara bulanan			



					- Laporan perkara tahunan - Laporan perkara upaya hukum			
6	Menetapkan tim survei	√	√	√	√	SK tim survei	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
7	Melaksanakan survei	√	√	√	√	Data hasil survei		
8	Menyusun laporan survei	√	√	√	√	Laporan survei		68.540.000

SASARAN STRATEGIS 2

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan Ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1	Melaksanakan minutasi perkara	√	√	√	√	Perkara telah diminutasi	Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	34.200.000
2	Membuat salinan putusan	√	√	√	√	Salinan putusan			
3	Mengirim salinan putusan yang disampaikan Ke para pihak secara tepat waktu	√	√	√	√	Bukti pengiriman salinan putusan			



SASARAN STRATEGIS 3

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	85%	85%	85%	85%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1	Merencanakan perkara-perkara yang akan diselesaikan di luar gedung pengadilan	√	-	√	√	Rencana sidang	Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	68.540.000
2	Membentuk susunan majelis hakim dan panitera yang akan melaksanakan penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan	√	-	√	√	Surat majelis hakim dan panitera			
3	Mengajukan permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan					<ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan pinjam tempat / ruang sidang - Surat ijin pinjam tempat / ruang sidang 			
4	Melaksanakan persidangan secara tepat waktu, transparan, efektif dan efisien					Putusan			



BAB V PENUTUP

Program Kerja Pengadilan Militer III-12 ini dibuat agar kegiatan pelaksanaan kerja lebih terarah, selain itu berguna untuk pelaksanaan pengawasan serta akan lebih mudah dievaluasi pada saat tahun anggaran 2024 ini berakhir sehingga dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam pembuatan program kerja pada tahun yang akan datang. Keberhasilan program kerja ini sangat bergantung pada dukungan seluruh personil Pengadilan Militer III-12 Surabaya sehingga semangat kerja dan kerja sama yang baik serta loyalitas yang tinggi sangat dibutuhkan dari masing-masing personil dalam melaksanakan program kerja ini.

Keseluruhan program kerja tersebut diatas akan dilaksanakan dengan mengacu pada Standard Operating Prosedure (SOP) yang ada, sehingga Pengadilan Militer III-12 Surabaya diharapkan dapat mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien dan mendapatkan kepercayaan public, professional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Dengan adanya Program kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2024 diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya agar kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya semakin prima dan serta mendukung terwujudnya Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang berintegritas, modern dan bermartabat. Reviu atas program kerja akan dilakukan apabila terdapat kebijakan atau peraturan baru dan juga bila terdapat revisi atas anggaran.